



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 46 TAHUN 2022**

**TENTANG
NILAI DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, nilai dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

[Handwritten signature]

Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah.

4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga yang ada pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan, Lembaga Teknis Daerah, kecamatan dan Kelurahan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi.
7. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
8. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
9. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
10. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
11. Jabatan Fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pedoman nilai dan kelas jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan peringkat jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III NILAI DAN KELAS JABATAN

Pasal 3

Nilai dan kelas jabatan digunakan sebagai dasar penyusunan/penyempurnaan peta jabatan, penyusunan/penyempurnaan struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi, dan redistribusi pegawai serta pemberian tunjangan kinerja.

Pasal 4

- (1) Nilai dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berdasarkan proses Evaluasi Jabatan.
- (2) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Faktor Jabatan.

Pasal 5

- (1) Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Faktor Evaluasi Jabatan Struktural; dan
 - b. Faktor Evaluasi Jabatan Fungsional.
- (2) Faktor Evaluasi Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Faktor 1 : ruang lingkup dan dampak program;
 - b. Faktor 2 : pengaturan organisasi;
 - c. Faktor 3 : wewenang penyelia dan manajerial;
 - d. Faktor 4 : hubungan personal yang harus dilakukan;
 - e. Faktor 5 : kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dasar; dan
 - f. Faktor 6 : kondisi lain berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Faktor Evaluasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Faktor 1 : pengetahuan dan keahlian;
 - b. Faktor 2 : pengawasan penyelia;
 - c. Faktor 3 : pedoman/panduan kerja;
 - d. Faktor 4 : kompleksitas pekerjaan;
 - e. Faktor 5 : ruang lingkup dan dampak tugas;
 - f. Faktor 6 : hubungan personal yang harus dilakukan;
 - g. Faktor 7 : tujuan hubungan;
 - h. Faktor 8 : persyaratan/tuntutan fisik; dan
 - i. Faktor 9 : lingkungan kerja.

Pasal 6

Hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas :

- a. Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. Daftar Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan
 - e. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

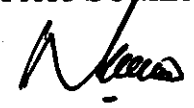
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 21 Maret 2022

↓ BUPATI SUMBAWA, ↓


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 46

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 46 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI
 KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

No	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
1	15	1
2	14	29
3	13	9
4	12	90
5	11	1203
6	10	37
7	9	1552
8	8	1554
9	7	421
10	6	1282
11	5	616
12	4	11
13	3	179
14	2	0
15	1	44
Total		7028

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
	SEKRETARIAT DAERAH			
1	Sekretaris Daerah	15	1	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14	0	
3	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	12	1	
4	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah / Analis Kebijakan	9	0	
5	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Sekretariat Daerah / Analis Kebijakan	9	1	
6	Kepala Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah / Analis Kebijakan	9	1	
7	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	12	1	
8	Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual pada Sekretariat Daerah / Analis Kebijakan	9	1	
9	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah / Analis Kebijakan	9	0	
10	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah / Analis Kebijakan	9	0	
11	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	12	1	
12	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah / Perancang Peraturan Perundang-Undangan	9	1	
13	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah / Analis Hukum	9	0	
14	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Daerah / Analis Hukum	9	1	
15	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	1	
16	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah	12	1	
17	Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BULD Sekretariat Daerah / Analis Kebijakan	9	1	
18	Kepala Sub Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah / Analis Kebijakan	9	1	
19	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah / Analis Kebijakan	9	1	
20	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	12	1	
21	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Sekretariat Daerah / Analis Kebijakan	9	1	
22	Kepala Sub Bagian Pengendalian Program pada Sekretariat Daerah / Analis Kebijakan	9	1	
23	Kepala Sub Bagian Evaluasi pelaporan pada Sekretariat Daerah / Analis Kebijakan	9	1	
24	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	12	1	
25	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah / Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	9	1	
26	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah/ Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	9	1	
27	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sekretariat Daerah / Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	9	1	
28	Asisten Administrasi Umum	14	1	
29	Kepala Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah	12	1	

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
995	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT KBPP-PA Kecamatan Utan pada DP2KBP3A	8	1	
	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak			
996	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	9	0	
997	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada DP2KBP3A	8	0	
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
998	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	1	
999	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12	1	
1000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1	
1001	Kepala Sub Bagian Keuangan / Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	9	1	
1002	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan / Perencana	9	1	
1003	Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF	11	0	
1004	Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik	9	1	
1005	Kepala Seksi Sarana Prasarana	9	1	
1006	Kepala Seksi Kelembagaan / Pengembang Teknologi Pembelajaran	9	1	
1007	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	11	1	
1008	Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik	9	1	
1009	Kepala Seksi Sarana Prasarana	9	1	
1010	Kepala Seksi Kelembagaan / Pengembang Teknologi Pembelajaran	9	1	
1011	Kepala Bidang Pembinaan SMP	11	1	
1012	Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik	9	1	
1013	Kepala Seksi Sarana Prasarana	9	1	
1014	Kepala Seksi Kelembagaan / Pengembang Teknologi Pembelajaran	9	1	
1015	Kepala Bidang Kebudayaan	11	1	
1016	Kepala Seksi Pengembangan Kebudayaan / Pamong Budaya	9	1	
1017	Kepala Seksi Pengembangan Kesenian Tradisional / Pamong Budaya	9	1	
1018	Kepala Seksi Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman / Pamong Budaya	9	1	
1019	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	11	0	
1020	Kepala Seksi Pembinaan Pendidik PAUD & Non Formal	9	1	
1021	Kepala Seksi Pembinaan Pendidik Pendidikan Dasar	9	1	
1022	Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan / Pengembang Penilaian Pendidikan	9	1	
1023	Kepala UPT Museum	9	0	
1024	Kepala Sub Bagian TU UPT Museum	8	1	

BUPATI SUMBAWA,

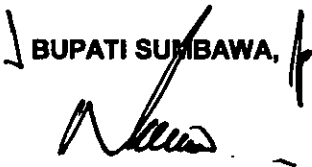
MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 46 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

No	Nama Jabatan Fungsional	UNIT ORGANISASI	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	SEKRETARIAT DAERAH				
1	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	13	1	
2	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan	Sekretariat Daerah	13	1	
3	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Daerah	13	1	
	JABATAN FUNGSIONAL				
4	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	Fungsional Sekretariat Daerah	12	2	
5	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Fungsional Sekretariat Daerah	10	7	
6	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Fungsional Sekretariat Daerah	8	0	
	BAGIAN PEMERINTAHAN				
7	Analisis Pemerintahan Daerah	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA	7	0	
8	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA	6	0	
9	Pengadministrasi Pemerintahan	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA	5	1	
10	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah SETDA	7	1	
11	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah SETDA	6	0	
12	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah SETDA	5	0	
13	Analisis Toponimi dan Data Wilayah	Sub Bagian Administrasi Kewilayahan SETDA	7	0	
14	Pengelola Toponimi	Sub Bagian Administrasi Kewilayahan SETDA	6	0	
15	Pengelola Data	Sub Bagian Administrasi Kewilayahan SETDA	6	0	
16	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Administrasi Kewilayahan SETDA	5	1	
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
17	Penyusun Bahan Pembinaan Keagamaan	Sub Bagian Bina Mental Spiritual SETDA	7	0	
18	Pengelola Data	Sub Bagian Bina Mental Spiritual SETDA	6	1	
19	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Bina Mental Spiritual SETDA	5	1	
20	Analisis kesejahteraan Rakyat	Sub Bagian Kesejahteraan Sosial SETDA	7	0	
21	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Sub Bagian Kesejahteraan Sosial SETDA	6	0	
22	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Kesejahteraan Sosial SETDA	5	0	
23	Analisis kesejahteraan Rakyat	Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat SETDA	7	0	
24	Pengelola Data	Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat SETDA	6	0	
25	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat SETDA	5	0	
	BAGIAN HUKUM				
26	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Sub Bagian Perundang-undangan SETDA	7	1	
27	Analisis Produk Hukum	Sub Bagian Perundang-undangan SETDA	7	0	
28	Pengelola Data	Sub Bagian Perundang-undangan SETDA	6	1	
29	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Perundang-undangan SETDA	5	0	
30	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	Sub Bagian Bantuan Hukum SETDA	7	0	
31	Pengelola Bantuan Hukum	Sub Bagian Bantuan Hukum SETDA	6	0	
32	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Bantuan Hukum SETDA	5	1	
33	Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum SETDA	7	0	
34	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum SETDA	6	1	
35	Pengolah Data Informasi dan Hukum	Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum SETDA	6	0	
36	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum SETDA	5	0	
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM				
37	Analisis Badan Layanan Umum	Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BULD SETDA	7	0	

No	Nama Jabatan Fungsional	UNIT ORGANISASI	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
5095	Pengelola Data	Seksi Pembinaan Pendidik PAUD & PNF	6	0	
5096	Analisis Tenaga Kependidikan	Seksi Pembinaan Pendidik Pendidikan Dasar	7	0	
5097	Pengadministrasi Umum	Seksi Pembinaan Pendidik Pendidikan Dasar	5	0	
5098	Pengelola Data	Seksi Pembinaan Pendidik Pendidikan Dasar	6	1	
5099	Analisis Tenaga Kependidikan	Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan	7	0	
5100	Pengadministrasi Umum	Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan	5	0	
5101	Pengelola Data	Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan	6	1	
		Kepala UPT Museum			
5102	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian TU UPT Museum	5	2	
5103	Pengelola Data Cagar Budaya dan Koleksi Museum	Sub Bagian TU UPT Museum	6	1	
		Satuan Pendidikan PAUD dan SD			
5104	JF Guru Utama	Satuan Pendidikan PAUD dan SD	13	4	
5105	JF Guru Madya	Satuan Pendidikan PAUD dan SD	11	562	
5106	JF Guru Muda	Satuan Pendidikan PAUD dan SD	9	574	
5107	JF Guru Pertama	Satuan Pendidikan PAUD dan SD	8	775	
5108	Pengelola Pendidikan	Satuan Pendidikan PAUD dan SD	6	528	
5109	Pengadministrasi Keuangan	Satuan Pendidikan PAUD dan SD	5	0	
5110	Pengadministrasi Umum	Satuan Pendidikan PAUD dan SD	5	0	
5111	Petugas Keamanan	Satuan Pendidikan PAUD dan SD	3	16	
5112	Pramu Kebersihan	Satuan Pendidikan PAUD dan SD	1	0	
		Satuan Pendidikan SMP			
5113	JF Guru Utama	Satuan Pendidikan SMP	13	1	
5114	JF Guru Madya	Satuan Pendidikan SMP	11	417	
5115	JF Guru Muda	Satuan Pendidikan SMP	9	221	
5116	JF Guru Pertama	Satuan Pendidikan SMP	8	200	
5117	Pengelola Pendidikan	Satuan Pendidikan SMP	6	28	
5118	Pengelola Laboratorium	Satuan Pendidikan SMP	6	0	
5119	Pengelola Kepegawaian	Satuan Pendidikan SMP	6	0	
5120	Pengelola Keuangan	Satuan Pendidikan SMP	6	0	
5121	Pengadministrasi Umum	Satuan Pendidikan SMP	5	68	
5122	Petugas Keamanan	Satuan Pendidikan SMP	3	20	
5123	Pramu Kebersihan	Satuan Pendidikan SMP	1	0	
		Jabatan Fungsional			
5124	JF Pamong Belajar Madya	Jabatan Fungsional	11	3	
5125	JF Pamong Belajar Muda	Jabatan Fungsional	9	3	
5126	JF Pamong Belajar Pertama	Jabatan Fungsional	8	7	
5127	JF Pamong Budaya Madya	Jabatan Fungsional	11	0	
5128	JF Pamong Budaya Muda	Jabatan Fungsional	9	0	
5129	JF Pamong Budaya Pertama	Jabatan Fungsional	8	0	
5130	JF Penilik Madya	Jabatan Fungsional	11	2	
5131	JF Penilik Ahli Muda	Jabatan Fungsional	9	11	
5132	JF Penilik Pertama	Jabatan Fungsional	8	1	
5133	JF Pengawas Sekolah Madya	Jabatan Fungsional	11	20	



BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 46 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	UNIT ORGANISASI	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	FACTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1-5)		FACTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1-3)	FACTOR 3 Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (Level 1-3)	FACTOR 4 Hubungan			FACTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Lev 1-8)		FACTOR 6 Kondisi Lain				
					4A Sifat Hubungan	4B Tujuan Hubungan			8	9	10							
1	2		3	4	5	6	7							11				
	SEKRETARIAT DAERAH																	
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	15	3,555	2	350	3	350	3	900	4	100	4	125	4	505	5	1225
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	14	3,030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
3	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	12	2,315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
4	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah / Analisis Kebijakan	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
5	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Sekretariat Daerah / Analisis Kebijakan	Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
6	Kepala Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah / Analisis Kebijakan	Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
7	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	12	2,315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
8	Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual pada Sekretariat Daerah / Analisis Kebijakan	Sub Bagian Bina Mental Spiritual Sekretariat Daerah	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
9	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah / Analisis Kebijakan	Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
10	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah / Analisis Kebijakan	Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
11	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	12	2,315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
12	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah / Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
13	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah / Analisis Hukum	Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
14	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Daerah / Analisis Hukum	Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
15	Asisten Perencanaan dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	14	3,030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
16	Kepala Bagian Perencanaan dan SDA Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan dan SDA Sekretariat Daerah	12	2,315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575

NO	NAMA JABATAN STRUKTURAL	UNIT ORGANISASI	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	FACTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1-5)		FACTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1-3)		FACTOR 3 Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (Level 1-3)		FACTOR 4 Hubungan			FACTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Law 1-8)		FACTOR 6 Kondisi Lain		
					5	4	6	7	8	9	4A Sifat Hubungan	4B Tujuan Hubungan	10					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1013	Kepala Seksi Sarana Prasarana	Seksi Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
1014	Kepala Seksi Kelambagaan / Pengembangan Teknologi Pembelajaran	Seksi Kelambagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
1015	Kepala Bidang Kebudayaan	Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	2,045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	6	575
1016	Kepala Seksi Pengembangan Kebudayaan / Pamong Budaya	Seksi Pengembangan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
1017	Kepala Seksi Pengembangan Kesenian Tradisional / Pamong Budaya	Seksi Pengembangan Kesenian Tradisional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
1018	Kepala Seksi Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman / Pamong Budaya	Seksi Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
1019	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11	2,045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	6	575
1020	Kepala Seksi Pembinaan Pendidik PAUD & Non Formal	Seksi Pembinaan Pendidik PAUD & Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
1021	Kepala Seksi Pembinaan Pendidik Pendidikan Dasar	Seksi Pembinaan Pendidik Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
1022	Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan / Pengembangan Penilaian Pendidikan	Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
1023	Kepala UPT Museum	UPT Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
1024	Kepala Sub Bagian TU UPT Museum	Sub Bagian TU UPT Museum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	1,295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310


 BUPATI SUMBAWA, A.

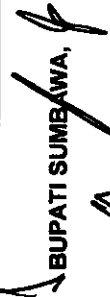

 MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL dan JABATAN LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATA	HARGA JABATA	FACTOR 1 Pengetahuan	FACTOR 2 Pengawasan	FACTOR 3 Pedoman	FACTOR 4 Kompleksita	FACTOR 5 RLingkup	FACTOR 6 Hub.	FACTOR 7 Tujuan	FACTOR 8 Tuntutan	FACTOR 9 Lingkungan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
SEKRETARIAT DAERAH																						
1	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	13	2715	7	1250	4	450	3	150	3	120	1	5								
2	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan		Sekretariat Daerah	13	2715	7	1250	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5	
3	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Daerah	13	2715	7	1250	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5		
JABATAN FUNGSIONAL																						
4	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	Fungsional Sekretariat Daerah	12	2220	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	4	110	2	50	1	5	1	5
5	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Fungsional Sekretariat Daerah	10	1695	6	950	3	275	2	125	3	150	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
6	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Fungsional Sekretariat Daerah	8	1270	5	750	2	125	2	75	2	75	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
BAGIAN PEMERINTAHAN																						
7	Analisis Pemerintahan Daerah	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
8	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
9	Pengadministrasi Pemerintahan	Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
10	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah SETDA	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
11	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah SETDA	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
12	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah SETDA	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
13	Analisis Toponimi dan Data Wilayah	Sub Bagian Administrasi Kewilayahan SETDA	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
14	Pengelola Toponimi	Sub Bagian Administrasi Kewilayahan SETDA	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
15	Pengelola Data	Sub Bagian Administrasi Kewilayahan SETDA	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
16	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Administrasi Kewilayahan SETDA	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																						
17	Penyusun Bahan Pembinaan Keagamaan	Sub Bagian Bina Mental Spiritual SETDA	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
18	Pengelola Data	Sub Bagian Bina Mental Spiritual SETDA	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
19	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Bina Mental Spiritual SETDA	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
20	Analisis kesejahteraan Rakyat	Sub Bagian Kesejahteraan Sosial SETDA	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
21	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Sub Bagian Kesejahteraan Sosial SETDA	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
22	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Kesejahteraan Sosial SETDA	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
23	Analisis kesejahteraan Rakyat	Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat SETDA	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
24	Pengelola Data	Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat SETDA	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
25	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat SETDA	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
BAGIAN HUKUM																						
26	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Sub Bagian Perundang-undangan SETDA	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
27	Analisis Produk Hukum	Sub Bagian Perundang-undangan SETDA	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
28	Pengelola Data	Sub Bagian Perundang-undangan SETDA	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATA	HARGA JABATA	FACTOR 1 Pegatahuan	FACTOR 2 Pengawasan	FACTOR 3 Pedoman	FACTOR 4 Kompleksita	FACTOR 5 R.Lingkup	FACTOR 6 Hub.	FACTOR 7 Tujuan	FACTOR 8 Tuntutan	FACTOR 9 Lingkungan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5128	JF Panong Budaya Muda	Jabatan Fungsional	9	1555	6	2	125	3	150	2	25	1	5
5129	JF Panong Budaya Pertama	Jabatan Fungsional	8	1280	5	2	125	3	150	2	25	1	5
5130	JF Penilik Madya	Jabatan Fungsional	11	1930	6	3	275	4	225	2	25	1	5
5131	JF Penilik Ahli Muda	Jabatan Fungsional	9	1355	5	2	125	3	150	2	25	1	5
5132	JF Penilik Pertama	Jabatan Fungsional	8	1280	5	2	125	3	150	2	25	1	5
5133	JF Pengawas Sekolah Madya	Jabatan Fungsional	11	1960	6	3	275	4	225	2	25	1	5



BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

